

## ANALISIS EKSTENSIFIKASI BARANG KENA CUKAI TERHADAP KANTONG PLASTIK DI INDONESIA

Eva Nikita Gultom

Ilmu Administrasi Fiskal, Universitas Indonesia, Jl. Margonda Raya, Depok, 16424  
E-mail: eva.nikita@ui.ac.id

### INFORMASI ARTIKEL

Tanggal masuk  
[20-08-2020]

Revisi  
[2020-10-07]

Tanggal terima  
[2020-12-08]

### ABSTRACT:

*The consumption of plastic bags in modern life is growing very rapidly, causing a high level of dependence. In fact, this increase does not go hand in hand with the handling of plastic waste. Indonesia is statistically ranked second as a producer of plastic waste heading to the sea after China. As anticipation, the Government through the Ministry of Finance has proposed a policy of collecting excise on plastic bags. Based on these things, with a qualitative approach, this study aims to analyze the extensification of excisable goods in plastic bags and provide input on the policy of using plastic bags that will be implemented in Indonesia. The results of the study concluded that the idea of extensification of excise on plastic bags is feasible to be considered considering the use of plastic bags that meet the characteristics of excisable goods and the potential revenue generated. In this case, the government can benchmark the implementation of plastic excise levies in other countries. The data collection method uses secondary data through literature studies which cause limitations in the study so that further research is needed.*

**Keywords:** excise, extensification, plastic bags, plastic waste, environmental impact

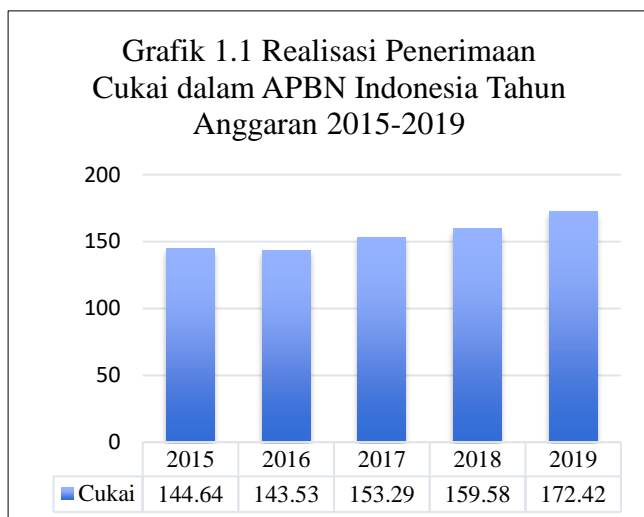
### ABSTRAK:

Konsumsi kantong plastik dalam kehidupan modern ini bertumbuh sangat pesat sehingga menyebabkan tingkat ketergantungan yang tinggi. Peningkatan ini nyatanya tidak berjalan berdampingan dengan penanganan dari sampah plastik yang dihasilkan. Indonesia secara statistik menempati peringkat kedua sebagai penghasil sampah plastik yang menuju ke laut setelah China. Sebagai antisipasi, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengusulkan kebijakan pemungutan cukai atas kantong plastik. Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan menganalisis ekstensifikasi barang kena cukai pada kantong plastik dan memberikan masukan atas kebijakan penggunaan kantong plastik yang akan diterapkan di Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa gagasan ekstensifikasi cukai pada kantong plastik layak untuk dipertimbangkan melihat penggunaan kantong plastik yang telah memenuhi sifat dan karakteristik barang kena cukai serta potensi penerimaan yang dihasilkan. Pemerintah dalam hal ini dapat melakukan benchmarking terhadap penerapan pemungutan cukai plastik di negara lain. Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder melalui studi literatur yang menyebabkan keterbatasan pada penelitian sehingga perlu penelitian berikutnya.

**Kata Kunci:** cukai, ekstensifikasi, kantong plastik, sampah, dampak lingkungan

## 1. PENDAHULUAN

Salah satu penyumbang terbesar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia berasal dari penerimaan pajak dimana 9-11% berasal dari kontribusi cukai. Cukai juga turut berkontribusi sebanyak 1,2% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (DJBC, 2020).



Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2020

Cukai tercatat menyumbang penerimaan yang tergolong besar terhadap APBN Indonesia. Data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada tahun 2015-2019 mencatat penerimaan cukai yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dalam Grafik 1 dapat dilihat realisasi penerimaan cukai dalam APBN tahun 2019 mencapai Rp 172,42 triliun. Realisasi ini melampaui target APBN sebesar 165,50 triliun atau meningkat 8,04% dibanding dengan realisasi tahun 2018 yang hanya mencapai Rp 159,58 triliun. Peningkatan penerimaan cukai ini utamanya berasal dari kenaikan tarif cukai untuk hasil tembakau atau rokok.

Dibanding dengan negara-negara lain, Indonesia termasuk negara yang sangat selektif dalam memungut cukai, terbukti dari barang kena cukai yang hingga saat ini masih dikenakan pada tiga jenis barang yaitu etil alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan hasil tembakau. Hampir semua negara telah mengenakan cukai atas ketiga produk tersebut, bahkan beberapa negara terlihat lebih agresif mengenakan cukai dengan berbagai alasan yang

variatif. Dengan tujuan menjaga kesehatan masyarakat, Pemerintah Jepang, Prancis, Jerman, India dan Singapura, mengenakan cukai atas gula dan sakarin. Beberapa negara juga mengenakan cukai atas beberapa produk yang pembuatannya atau penggunaannya dianggap mencemari lingkungan, seperti cukai atas produk semen dan detergen yang dikenakan di India dan Malaysia, cukai atas pestisida dan CO<sub>2</sub> di Finlandia, cukai atas emisi di Swedia, hingga cukai atas plastik di Denmark, Afrika Selatan, dan Malaysia.

Jenis barang kena cukai di Indonesia pada dasarnya dapat ditambah atau dikurangi seiring perkembangan ekonomi, situasi politik, atau keuangan negara. Gagasan penambahan jenis Barang Kena Cukai (BKC) sudah dibahas sejak evaluasi komprehensif nasional Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Oktober 1998 yang kemudian menjadi salah satu topik strategis dari sub bidang sistem dan prosedur cukai (Karim, 2001). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada rapat kerja dengan Komisi IX DPR Februari 2020 lalu, mengusulkan pengenaan pungutan cukai baru pada kantong plastik (Kompas, 2020). Usulan ini diajukan sebagai langkah preventif pemerintah melakukan pembatasan penggunaan kantong plastik yang berpengaruh besar pada pencemaran lingkungan, khususnya lautan Indonesia.

Kantong plastik sudah begitu populer saat pertama kali diperkenalkan pada akhir 1970-an sebagai bahan pengemasan karena bahannya yang ringan, kuat, fleksibel, murah, tahan lama dan tahan air (Mogomotsi, 2019). Konsumsi kantong plastik memiliki dua jenis biaya yakni biaya pengadaan dan biaya eksternalitas negatif (Haoran, 2012). Biaya eksternalitas negatif sering kali diperparah dalam praktik penggunaannya sehari-hari akibat penggunaan yang kurang bertanggung jawab.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat jumlah timbunan sampah di Indonesia secara nasional sebesar 175.000 ton per hari atau setara dengan 64 juta ton per tahun. Komposisi sampah tersebut didominasi oleh 50% sampah organik, 15% sampah plastik, 10% sampah kertas dan sisanya terdiri dari sampah kaca, karet, logam dan lain-

lain. Salah satu jenis sampah yang paling sulit terurai adalah sampah plastik dimana membutuhkan waktu sekitar 20-500 tahun untuk dapat terurai sempurna. Sampah plastik menjadi persoalan pelik hampir di berbagai negara di dunia. Hingga saat ini, tercatat sebesar 150 juta ton plastik tersebar di lautan dunia. Meski begitu, beberapa negara maju di dunia mampu mengatasinya dengan menerapkan sistem yakni

pengembalian botol. Minuman dalam botol plastik diperlakukan sistem jaminan dimana sehabis dipakai, botol plastik dikembalikan ke mesin deposit di pasar swalayan dan nantinya konsumen akan mendapat uang jaminannya kembali.

Secara statistik, tidak terdapat data akurat tentang jumlah pencemaran sampah plastik di Indonesia. Berdasarkan data KLHK yang dikeluarkan pada tahun 2016, rata-rata individu per hari menghasilkan 0,12 kg sampah plastik atau lebih dari 100 miliar sampah plastik setiap tahunnya. Sampah kantong plastik yang dihasilkan mencapai 10,95 juta/lembar/tahun/100 gerai dengan pemakaian sebanyak 700 kantong/orang/tahun (Ekawati, 2016). Dari total timbulan sampah plastik yang ada, diperkirakan baru sebanyak 10-15% saja yang didaur ulang, 60-70% ditimbun di Tempat Pembuangan Sementara/Akhir, sedangkan sisanya belum terkelola dan terbuang begitu saja ke lingkungan, mencemari daratan hingga lautan Indonesia. Fakta ini kemudian menempatkan Indonesia sebagai peringkat kedua sebagai penghasil sampah plastik ke laut di dunia dengan total 187,2 juta ton setelah China yang mencapai 262,9 ton (Jambeck, 2015).

Pemerintah melihat hal ini tentunya tidak tinggal diam. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dimana target sampah berkurang sebesar 20 persen dan tertangani sebesar 75 persen, pemerintah dituntut untuk segera membuat program pencegahan kerusakan lingkungan yang strategis, sistematis, dan seragam. Cukai dalam hal ini menjadi salah satu alat fiskal yang efektif untuk mengendalikan produksi dan konsumsi termasuk peredaran barang yang dianggap membahayakan masyarakat. Pengendalian konsumsi dengan

pengolahan sampah plastik yang tegas. Dikutip dari World Economic Forum, dengan persentase sampah yang diolah kembali sudah di atas 50 persen, Jerman menjadi negara dengan tingkat daur ulang sampah terbaik di dunia. Kotak pembuangan sampah ‘warna-warni’ menjadi kunci keberhasilan negara ini. Sementara itu, khusus untuk sampah botol plastik, di Jerman dikenal istilah ‘Pfandflasche’

mekanisme cukai pada kantong plastik layak untuk diterapkan karena besaran tarif cukai dapat disesuaikan dengan karakter barangnya. Semakin lama jenis plastik untuk dapat terurai, maka dapat dikenakan tarif cukai yang lebih tinggi.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian dilakukan untuk menganalisis kebijakan ekstensifikasi barang kena cukai terhadap kantong plastik di Indonesia. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya dengan menggunakan objek studi yang berbeda. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atas kebijakan penggunaan kantong plastik yang akan diterapkan di Indonesia.

Penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah. Namun terdapat keterbatasan bahwa penelitian ini tidak menganalisis dampak pengenaan cukai terhadap pelaku usaha kantong plastik dan masyarakat. Keterbatasan yang lain adalah data konsumsi kantong plastik yang digunakan merupakan data rata-rata konsumsi satu tahun, akan lebih detail jika data yang digunakan adalah data proyeksi tahunan sehingga dapat melihat potensi penerimaan dari cukai kantong plastik.

### **1.1 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan ekstensifikasi barang kena cukai pada kantong plastik?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam mewujudkan ekstensifikasi barang kena cukai pada kantong plastik?
3. Bagaimana potensi penerimaan negara dari pengenaan cukai pada kantong plastik?

### **1.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang akan dicapai sebagaimana pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan ekstensifikasi barang kena cukai pada kantong plastik.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mewujudkan ekstensifikasi barang kena cukai pada kantong plastik.
3. Untuk mengetahui potensi penerimaan negara dari pengenaan cukai pada kantong plastik.

## 2. KAJIAN LITERATUR

### 2.1 Cukai

Menurut Sijbren Cnossen, cukai merupakan salah satu jenis pajak tertua di dunia karena cukai telah diperkenalkan sejak masa dinasti Han yakni cukai yang dikenakan pada teh, alkohol, dan ikan (Cnossen, 1977). Definisi cukai menurut McCarten adalah *taxes imposed on the consumption of selected goods, such as alcoholic beverages, tobacco products, and petroleum products* (Parthasarathi, 1995) yang berarti pajak dibebankan atas konsumsi barang tertentu seperti minuman beralkohol, hasil tembakau dan hasil minyak. Cukai merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang memiliki karakteristik khusus, yang tidak dimiliki oleh jenis pajak lainnya, bahkan tidak serupa dengan jenis pajak yang sama-sama tergolong kategori pajak tidak langsung (Subiyantoro, 2004). Cukai adalah pajak yang dikenakan pada barang atau jasa tertentu (*selective taxes on goods and services*) yang mempunyai eksternalitas negatif dengan tujuan mengurangi atau membatasi produksi dan konsumsi barang dan/atau jasa tersebut. Pemungutan cukai dititikberatkan pada fungsi regulierend karena dalam praktiknya sering kali seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa memperhatikan biaya eksternalnya, sehingga harga yang dibayar seolah-olah lebih murah dibanding harga yang seharusnya (Rosdiana dan Irianto, 2012).

Sijbren Cnossen menggolongkan karakteristik cukai menjadi tiga bagian atau yang sering disebut sebagai *legal character* cukai diantaranya: (1) *Selectivity in Coverage*. Cukai memiliki kedudukan yang sama dengan pajak konsumsi lainnya seperti pajak penjualan (PPn) dan pajak pertambahan nilai (PPN), namun

karakteristik cukai berbeda dengan PPn dan PPN. Dari sisi pemilihan objek, PPn dan PPN bersifat general tanpa membedakan jenis barang, sedangkan cukai dalam pemilihan objek bersifat terbatas akibat tujuan dasar pemungutan cukai yang memang berbeda. Konsekuensi lain berkaitan dengan karakteristik cukai yang bersifat selektif adalah bahwa tingkat tarif cukai untuk masing-masing produk yang dipungut cukai akan ditentukan secara terpisah; (2) *Discrimination in Intent*. Cukai dipungut bukan semata-mata untuk dijadikan sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga untuk tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh negara, antara lain: untuk meningkatkan pendapatan, mengkompensasikan biaya eksternalitas, mengendalikan konsumsi, dan mengenakan biaya penggunaan jalan yang disediakan oleh Pemerintah; dan (3) *Quantitative Measurement*. Pemungutan cukai pada umumnya berimplikasi pada pengawasan fisik. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan kewajiban pajak serta meyakinkan agar para subjek cukai menaati peraturan yang ada. Bentuk pengawasannya dapat dilakukan dengan pita cukai atau dengan memeriksa pembukuan (Rosdiana dan Irianto, 2012).

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, cukai didefinisikan sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Adapun sifat atau karakteristik yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. barang-barang tertentu yang konsumsinya perlu dikendalikan;
- b. barang-barang tertentu yang peredarannya perlu diawasi;
- c. barang-barang tertentu yang pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif baik bagi masyarakat atau lingkungan hidup;
- d. barang-barang tertentu yang pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara sebagai sarana untuk memenuhi rasa keadilan dan keseimbangan di masyarakat. Pungutan cukai ini dikenakan terhadap barang yang dikategorikan sebagai barang mewah atau

bernilai tinggi, namun bukan merupakan kebutuhan pokok, sehingga tetap terjaga keseimbangan pembebanan pungutan antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan konsumen berpenghasilan rendah.

Pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, hanya mengenakan barang kena cukai pada tiga produk yakni produk etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Pasal ini kemudian menjadi landasan dan kepastian hukum untuk pemerintah dapat menggarap rencana perluasan Barang Kena Cukai (BKC) atau biasa disebut ekstensifikasi objek cukai.

## 2.2 Teori Eksternalitas

David N. Hyman (1986) mengemukakan eksternalitas sebagai biaya atau keuntungan dari transaksi pasar yang tidak direfleksikan ke dalam komponen harga. Lebih jauh Baumol dan Oates (1975) menjelaskan tentang konsep eksternalitas dalam dua pengertian yang berbeda, antara lain:

1. Eksternalitas yang bisa habis (*depletable externality*) yaitu suatu dampak eksternal yang mempunyai ciri barang individu (*private goods*) dimana jika barang itu dikonsumsi oleh seseorang individu, barang itu tidak akan bisa dikonsumsi oleh orang lain.
2. Eksternalitas yang tidak habis (*undepletable externality*) yaitu suatu efek eksternal yang mempunyai ciri barang publik (*public goods*) yang mana barang tersebut bisa dikonsumsi oleh seseorang dan orang lain. Dengan kata lain, besarnya konsumsi seseorang akan barang tersebut

tidak akan mengurangi konsumsi bagi individu yang lainnya (Sutikno dan Maryunani, 2006).

Konsep eksternalitas ini berkaitan erat dengan permasalahan dalam ekonomi lingkungan. Keberadaan eksternalitas yang merupakan barang publik seperti polusi udara, air dan suara merupakan contoh eksternalitas tidak habis yang memerlukan instrumen ekonomi untuk menginternalisasikan dampak tersebut dalam aktivitas dan analisis ekonomi. Rosdiana (2014) menyatakan bahwa pajak dapat digunakan untuk mengoreksi efek eksternalitas negatif. Pajak yang dimaksud adalah *Pigouvian Tax* yaitu pajak yang dikenakan pada per unit output yang dikenakan atas jumlah yang seimbang dengan biaya marginal dari kerusakan yang ditimbulkan. Dengan pengenaan pajak akibat eksternalitas negatif yang ditimbulkan, maka produsen akan membebankan biaya tersebut kepada biaya produksi (jika produsen menghasilkan eksternalitas negatif) atau biaya konsumsi (jika konsumen menghasilkan eksternalitas negatif). Pada akhirnya pemungutan pajak ini akan mengurangi penggunaan maupun produksi barang yang menghasilkan eksternalitas negatif. Oleh karena itu, para ekonom umumnya menganjurkan instrumen pemungutan pajak karena lebih efisien untuk mengurangi polusi dibandingkan jika pemerintah hanya membuat regulasi mengenai polusi (Hutasoit dan Rosdiana, 2014).

## 2.3 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan terkait dengan cukai kantong plastik, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu terkait Cukai Kantong Plastik**

| No | Penulis                                 | Variabel  | Metodologi  | Hasil   |
|----|---|---|---|---|
| 1  | Esther M. Chandra & Rini Gufraeni, 2009 | Dasar pertimbangan, upaya pemerintah, dan potensi penerimaan                                | Pendekatan Kualitatif: Studi Literatur & Wawancara Mendalam | Dasar pertimbangan ekstensifikasi cukai yaitu pemenuhan sifat atau karakteristik BKC (UU No. 39 Tahun 2007). Pemerintah melakukan ekstensifikasi cukai. Ekstensifikasi cukai dapat meningkatkan penerimaan cukai. |
| 2  | Purwoko, 2012                           | Potensi penerimaan, efektivitas instrumen, dampak ekonomi, dan alternatif barang substitusi | Pendekatan Kualitatif: Studi Literatur                      | Pengenaan cukai menghasilkan penerimaan cukai yang signifikan, mampu mengurangi permintaan kantong plastik, berpengaruh terhadap PDB, dan memberikan peluang produksi barang substitusi kantong plastik.          |

|   |                                 |   |  |   |
|---|---------------------------------|---|--|---|
| 3 | Syanni Yustiani & Maryadi, 2020 | Implementasi kebijakan di Botswana, Irlandia, Afrika Selatan, Kanada, dan China | Pendekatan Kualitatif: Studi Literatur | Setiap negara menggunakan kebijakan mengatur tingkat ketebalan plastik dan pengenaan pajak/retribusi/cukai melalui mekanisme pasar. |
|---|---------------------------------|---|--|---|

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu seperti terlihat dalam Tabel 2.1, penelitian ini mempunyai beberapa perbedaan, diantaranya (1) jenis objek studi yang berbeda; (2) fokus penelitian yang menitikberatkan pada analisis dasar pertimbangan, upaya pemerintah dan potensi penerimaan, serta (3) penelitian hanya menggunakan satu negara komparasi terkait penerapan kebijakan cukai kantong plastik.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong penelitian eksploratif dan deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, karena masalah yang diangkat termasuk baru, ditandai dengan masih sedikitnya tulisan mengenai masalah ini serta untuk memberikan gambaran jelas tentang upaya ekstensifikasi barang kena cukai pada kantong plastik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan data sekunder yang dapat mendukung kebenaran data penelitian melalui studi literatur yang menelaah sumber tertulis dimana berkaitan dengan implementasi kebijakan penggunaan kantong plastik di dunia baik berupa pajak/cukai/retribusi serta industri kantong plastik.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Dasar Pertimbangan Ekstensifikasi Cukai pada Kantong Plastik

Ketentuan Barang Kena Cukai diatur dalam UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan terkait sifat dan karakteristik barang-barang tertentu yang dinyatakan sebagai barang kena cukai, antara lain: a) konsumsinya perlu dikendalikan; b) peredarannya perlu diawasi; c) pemakaiannya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau d) pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Gagasan ekstensifikasi cukai pada kantong plastik layak

untuk dipertimbangkan melihat penggunaan kantong plastik yang telah memenuhi sifat dan karakteristik barang kena cukai diatas.

Dasar pertimbangan pertama mengapa kantong plastik diajukan sebagai objek cukai baru karena ketergantungan terhadap kantong plastik yang semakin tinggi dan cenderung berlebihan, oleh sebab itu konsumsinya perlu dikendalikan. Penggunaan kantong plastik dalam kehidupan modern ini bertumbuh pesat sehingga menyebabkan tingkat ketergantungan masyarakat pada kantong plastik yang semakin tinggi. Kegiatan produksi industri plastik juga menyumbang peran besar terhadap peningkatan ini. Kementerian Perindustrian mencatat pertumbuhan industri plastik dan karet pada tahun 2018 tumbuh signifikan sebesar 6,92% secara tahunan, naik dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 2,47%. Terdapat 925 perusahaan yang memproduksi berbagai macam produk plastik dengan kesanggupan produksi sebesar 4,68 juta ton per tahun. Peningkatan produksi industri plastik akan terus menerus berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi. Faktanya, peningkatan konsumsi plastik berbanding terbalik dengan penanganan dari sampah plastik yang dihasilkan. Indonesia sendiri termasuk salah satu negara yang menyebabkan polusi plastik cukup besar terutama dalam hal pengelolaan limbah, dimana empat sungai di Indonesia menempati peringkat 20 terbesar yang paling tercemar di dunia. Secara statistik, Indonesia juga menempati peringkat kedua sebagai penghasil sampah plastik yang menuju ke laut setelah China. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi (2019), menjelaskan bahwa pengendalian konsumsi masyarakat akan plastik berbentuk kantong melalui pengenaan cukai dilakukan untuk menjaga lingkungan dari sampah plastik di laut yang tidak hanya mencemari laut namun juga biota yang hidup di dalamnya (Kementerian Keuangan, 2019).

Dasar pertimbangan kedua atas perluasan barang kena cukai pada kantong plastik yaitu bahaya bagi kesehatan akibat penggunaan kantong plastik yang tidak memenuhi ketentuan, sehingga peredarannya perlu diawasi. Hal ini sesuai dengan karakteristik cukai menurut Sijbren Cnossen yakni *Selectivity in coverage* yang menjelaskan bahwa pengenaan cukai didasarkan atas barang-barang yang sifatnya selektif, artinya konsumsi barang tersebut mampu menimbulkan dampak negatif. Kantong plastik dalam hal ini layak dimasukkan sebagai barang kena cukai melihat dampak negatif yang ditimbulkan. Saat ini banyak supermarket, toko dan warung yang memberikan kantong plastik secara gratis untuk membungkus barang belanjaan pembeli. Tetapi dibalik itu, tidak banyak masyarakat yang mengetahui bahaya dari kantong plastik jika digunakan dengan cara yang salah. Penggunaan kantong plastik yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) mampu menimbulkan berbagai gangguan pada kesehatan. Beberapa pelaku usaha terutama yang tidak terdaftar di BPOM, kerap kali tidak mencantumkan keterangan terkait bahan dasar serta kandungan yang terdapat dalam kantong plastik, sehingga tidak diketahui apakah kantong plastik tersebut sudah sesuai dengan tipe pangan dan kondisi penggunaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala BPOM tentang Bahan Kemasan Pangan. Salah satu komposisi material plastik yang sering digunakan secara umum adalah Bisphenol (BPA). Material ini tergolong berbahaya terhadap kesehatan karena BPA akan melebur dan bercampur ke dalam makanan yang dikonsumsi manusia setiap kali penggunaannya. Selain melebur ke makanan, BPA juga dapat terpapar melalui atmosfer dikarenakan kemampuannya yang dapat menyublim. Menurut penelitian ahli kimia, zat karsinogenik yaitu zat pewarna yang keluar dari kantong plastik apabila terkena panas secara langsung (misalnya dari gorengan panas/ paparan sinar matahari langsung), dapat terurai dan terdegradasi menjadi bentuk radikal yang dapat menyebabkan peradangan paru-paru hingga menimbulkan pembengkakan pada hati (Karuniastuti, 2019).

Dasar pertimbangan ketiga yakni penggunaan kantong plastik yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Penggunaan kantong plastik yang berlebihan sering kali menghasilkan jumlah sampah plastik yang besar. Dari total timbulan sampah plastik yang ada, diperkirakan baru sebanyak 10-15% saja yang didaur ulang, 60-70% ditimbun di Tempat Pembuangan Sementara/Akhir, sedangkan sisanya belum terkelola dan terbuang begitu saja. Sampah plastik dari kebanyakan rumah tangga dibuang begitu saja atau dibakar. Kebiasaan membakar sampah plastik kerap dilakukan untuk mengurangi tumpukan sampah. Saat melalui proses pembakaran, sampah plastik akan menyusut menjadi abu, namun cara ini justru berdampak negatif bagi kesehatan. Menurut Direktur Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia Dr Emil Budianto (2018), timbunan sampah plastik menyimpan kandungan karbon dan hidrogen. Zat-zat tersebut akan berkumpul dengan zat lain seperti klorida yang ditemukan pada sisa makanan, dan ketika disulut api, campurannya akan memproduksi dioksin dan furan. Zat ini dalam konsentrasi kecil saja dapat menyebabkan kematian. Paparan zat dioksin apabila dihirup manusia dalam waktu singkat akan menimbulkan reaksi batuk, sesak napas, pusing, dan jika dihirup dalam waktu yang lama akan memicu kanker dan kerusakan sistem saraf. (Kompas, 2018).

Sampah plastik memiliki sifat sulit terdegradasi (*non-biodegradable*) karena bukan berasal dari senyawa biologis serta memiliki rantai karbon yang panjang, sehingga sulit diurai oleh mikroorganisme. Sampah plastik diperkirakan membutuhkan waktu 100 hingga 500 tahun agar dapat terurai dengan sempurna. Saat terdekomposisi (terurai), partikel-partikel dalam plastik akan mencemari tanah dan air tanah. Heru Pambudi (2019) sependapat dengan menjelaskan bahwa sampah plastik dapat menyebabkan kerusakan pada tanah karena mengganggu kesuburannya (Kementerian Keuangan, 2019). Kantong plastik ramah lingkungan yang menjadi tren *Sustainable Living Life Style* di Tahun 2019 pun tetap akan menjadi sampah dan membutuhkan waktu terurai yang lama, terlebih lagi karena sifatnya

yang cepat terurai menjadi mikro plastik, akan lebih mudah untuk mencemari lingkungan. Dari proses produksi, konsumsi, hingga pembuangannya, plastik menghasilkan emisi karbon yang tinggi sehingga turut berkontribusi terhadap perubahan iklim karena kondisi bumi yang semakin memanas. Sumber material kantong plastik yang terbuat dari minyak bumi (merupakan sumber daya alam tak terbarukan), mengakibatkan pencemaran lingkungan di negara berkembang karena limbah pabriknya dibuang ke sungai dan pembakaran gas metana dimana menghasilkan emisi karbon ke udara.

Dasar pertimbangan yang terakhir yaitu kantong plastik tidak termasuk barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, sehingga atas pemakaiannya perlu dibebankan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, yang dimaksud dengan 'pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara dalam rangka keadilan dan keseimbangan' adalah pungutan cukai dapat dikenakan terhadap barang mewah dan atau bernilai tinggi, namun bukan merupakan kebutuhan pokok sehingga tetap terjaga keseimbangan pembebanan pungutan antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan konsumen yang berpenghasilan rendah. Dasar pertimbangan ini sesuai dengan karakteristik *Discrimination in intent*, yakni pengenaan cukai bukan semata-mata untuk alasan keuangan negara, melainkan juga untuk alasan non keuangan negara. Penerimaan dari cukai kantong plastik dalam hal ini bukanlah bertujuan untuk menambah pendapatan negara, namun akan dialihkan untuk penanganan sampah dari kantong plastik tersebut. Kantong plastik tidak masuk dalam kategori barang kebutuhan pokok serta mempunyai ciri barang publik yang menghasilkan eksternalitas tidak habis (*undepletable externality*) dimana besarnya konsumsi seseorang akan kantong plastik tidak akan mengurangi konsumsi kantong plastik bagi yang lainnya. Konsep eksternalitas ini berkaitan erat dengan permasalahan lingkungan akibat sampah plastik dimana memerlukan instrumen ekonomi untuk menginternalisasikan dampak yang dihasilkan. Pemungutan cukai dengan menetapkan tarif cukai pada kantong plastik

merupakan salah satu instrumen fiskal yang sesuai untuk diterapkan. Sebagai pertimbangan, beberapa negara lain di dunia juga telah membatasi konsumsi kantong plastik dengan memberlakukan kebijakan penetapan tarif cukai pada kantong plastik seperti yang dilakukan negara Denmark, Afrika Selatan, Taiwan, Irlandia, Wales, Malaysia, Vietnam, Hongkong, Inggris, Kenya, dan Kamboja (Liputan 6, 2019).

#### **4.2 Upaya Pemerintah Mewujudkan Ekstensifikasi Cukai Kantong Plastik**

Upaya pertama yang dapat dilakukan pemerintah yaitu membuat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait ekstensifikasi barang kena cukai pada kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU Cukai. Gagasan penambahan barang kena cukai telah tertuang sebelumnya dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai yang menyatakan bahwa penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Gagasan ini kemudian semakin dipertegas dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yang merupakan amandemen dari UU No. 11 Tahun 1995. Peraturan baru ini dinilai semakin membuka peluang pemerintah untuk melakukan perluasan barang kena cukai, terkhususnya pada kantong plastik. Pemerintah dalam rangka penambahan atau pengurangan jenis barang kena cukai perlu mendapat persetujuan DPR RI yang membidangi keuangan agar dimasukkan dalam RUU tentang APBN.

Upaya kedua yang dapat dilakukan pemerintah adalah melakukan berbagai kajian terhadap barang-barang yang akan dikenakan cukai. Dalam hal ekstensifikasi cukai pada kantong plastik, kajian dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bekerja sama dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF), tidak lupa melakukan koordinasi dengan kementerian terkait termasuk juga pengusaha dan pihak terkait lainnya. Pemerintah perlu mengkaji kesesuaian pengenaan cukai pada kantong plastik baik secara teori dan karakteristik, tidak lupa juga melakukan *benchmarking* terhadap pemungutan cukai plastik di negara lain. Irlandia diketahui menjadi



negara dengan tarif cukai tertinggi terhadap kantong plastik, yakni sekitar Rp 3.272 per lembar. Pemerintah Irlandia telah memberlakukan pungutan cukai terhadap kantong plastik sejak tahun 2002. Pendapatan dari cukai kantong plastik sejak tahun 2002 hingga 2013 diketahui menghasilkan total Euro 200 juta atau sekitar 3,4 triliun jika dikonversikan ke dalam bentuk rupiah. Pendapatan ini diketahui digunakan untuk proyek administrasi dan lingkungan yang dikelola oleh Dana Lingkungan dan mendanai Badan Perlindungan Lingkungan Irlandia untuk proyek perbaikan lingkungan, peningkatan kesadaran, dan tujuan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan cukai pada kantong plastik di Irlandia selama tahun 2014 menunjukkan penurunan persentase jumlah sampah kantong plastik yakni 40 kali lebih sedikit dibandingkan tahun 2000. Selain itu, diperkirakan jumlah sampah kantong plastik di laut menurun dari 5% pada tahun 2001 menjadi 0,25% pada tahun 2010.

Upaya terakhir yang dapat dilakukan pemerintah guna mewujudkan ekstensifikasi cukai pada kantong plastik yakni melakukan sosialisasi baik secara internal maupun eksternal

kepada pihak yang terkait. Sosialisasi dilakukan sebagai upaya mendukung kajian yang dilakukan pemerintah sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai tujuan pemungutan cukai kantong plastik yang bukan semata-mata hanya sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga untuk mengendalikan dampak negatif terhadap lingkungan. Tidak dipungkiri bahwa gagasan perluasan barang kena cukai pada kantong plastik menimbulkan pro kontra dalam masyarakat. Menurut Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi (2019), cukai atas plastik layak dikenakan jika merujuk pada eksternalitas negatif yang ditimbulkan baik bagi pengguna, orang lain serta lingkungan. Meskipun begitu, Tulus (2019) menambahkan bahwa pengenaan cukai bukanlah satu satunya cara untuk menekan konsumsi plastik. Menurutnya pemerintah dalam memberlakukan cukai plastik perlu memperhatikan tiga faktor diantaranya: menjamin tujuan utama penerapan cukai plastik, penerapan cukai plastik hanyalah masa transisi, serta dana yang diperoleh dari cukai plastik digunakan untuk mendukung upaya pengurangan konsumsi plastik dalam lingkungan masyarakat.

**Tabel 4.1 Statistik Kinerja Industri Barang dari Plastik Untuk Kemasan Tahun 2010-2015**

| Tahun | Pelaku Usaha | Tenaga Kerja | Biaya Bahan Baku (Rp) | Nilai Produksi (Rp) | Input (Rp)     | Output (Rp)    |
|-------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 2010  | 508          | 85,592       | 8,975,847,935         | 17,207,898,090      | 10,320,698,905 | 18,654,943,596 |
| 2011  | 509          | 92,922       | 18,045,163,348        | 28,887,641,343      | 20,562,162,242 | 30,295,346,832 |
| 2012  | 503          | 88,219       | 19,153,505,625        | 28,104,705,977      | 22,785,453,223 | 29,748,237,804 |
| 2013  | 526          | 89,914       | 14,387,108,503        | 23,204,804,508      | 16,542,020,527 | 24,197,753,204 |
| 2014  | 551          | 99,808       | 21,368,632,969        | 39,282,254,006      | 23,558,568,599 | 45,377,146,088 |
| 2015  | 569          | 158,567      | 44,619,890,803        | 75,780,522,006      | 52,020,997,026 | 78,817,367,244 |

Sumber : Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2020

**Tabel 4.2 Kondisi Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik di Tahun 2016-2019**

| No | Keterangan       | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    |
|----|------------------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Tenaga Kerja     | 465.804 | 527.313 | 554.318 | 601.022 |
| 2  | Pertumbuhan (%)  | -8,50   | 2,47    | 6,92    | -5,52   |
| 3  | PDB Nasional (%) | 0,64    | 0,72    | 0,74    | 0,66    |

*Sumber: Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2020*

### 4.3 Potensi Penerimaan Negara dari Pengenaan Cukai pada Kantong Plastik

Kebijakan ekstensifikasi cukai pada kantong plastik bukanlah semata-mata ditujukan hanya untuk menggali pendapatan negara, melainkan juga untuk mengendalikan dampak negatif terhadap lingkungan dari sampah plastik yang dihasilkan. Sesuai dengan teori Sijbren Cnossen yakni *Quantitative Measurement* yaitu dalam hal pengawasan dan administrasi pemungutan barang kena cukai pada calon barang kena cukai, dalam hal ini kantong plastik, dapat dilakukan

Industri kantong plastik di Indonesia terus berkembang seiring kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi. Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat dari tahun 2010 hingga 2015 terdapat penambahan unit perusahaan sebagai pelaku usaha dalam industri kantong plastik setiap tahunnya. Peningkatan jumlah pelaku usaha ini juga diiringi penambahan jumlah penyerapan tenaga kerja yang meningkat secara signifikan pada tahun 2015 yaitu sebanyak 158,567 tenaga kerja, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan

Dalam Tabel 4.2 terlihat kondisi perkembangan industri karet, barang dari karet dan plastik dari tahun 2016-2019. Perkembangan industri plastik dapat dilihat dari peningkatan jumlah tenaga kerja, angka pertumbuhan industri dari segi jumlah unit usaha serta jumlah produksi yang meningkat tiap tahunnya, serta angka rata-rata peningkatan pada penerimaan yang disumbangkan terhadap PDB Nasional. Pada tahun 2019, meskipun jumlah tenaga kerja yang diserap mengalami peningkatan, namun angka pertumbuhan industri justru menunjukkan sebaliknya. Penurunan laju pertumbuhan sebesar 5,52% ini disebabkan oleh penurunan permintaan dari luar negeri serta adanya wabah jamur yang menyerang tanaman karet sehingga mengurangi suplai bahan baku. Peraturan Daerah mengenai larangan penggunaan kantong plastik juga turut serta ambil bagian dalam penurunan laju pertumbuhan industri ini. Diketahui ada 22 daerah/kota yang sudah mengadopsi regulasi pelarangan penggunaan konsumsi kantong plastik, diantaranya Pemerintah Kota Jakarta, Bogor, Balikpapan, Banjarmasin, dan Bali. Beberapa ritel seperti

dengan mengikuti prosedur administrasi barang kena cukai yang sebelumnya telah diterapkan. Dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, disebutkan bahwa pelunasan cukai dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu pembayaran, pelekatan pita cukai, atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya. Pengenaan cukai kantong plastik dapat dilakukan dengan cara pembayaran yakni penerapan tarif cukai pada saat pembelian kantong plastik oleh konsumen.

jumlah penyerapan tenaga kerja tahun sebelumnya yaitu 99,808 tenaga kerja. Peningkatan ini terjadi akibat fokus program peningkatan kualitas SDM industri dengan sistem *three-in-one* (Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan) yang diusung oleh Kementerian Perindustrian. Tidak hanya itu, peningkatan pertumbuhan industri kantong plastik juga terjadi baik di biaya bahan baku, nilai produksi, nilai input serta nilai output industri di tahun 2010 hingga 2015.

toko dan supermarket juga sudah menerapkan biaya tambahan kepada konsumen. Namun begitu, kebijakan ini dinilai sulit dalam penerapannya, terutama dari sisi penegakan hukum yakni penetapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran. Kebijakan ini dinilai tidak memiliki keseragaman serta pertanggungjawaban penerimaan yang jelas karena dilakukan secara individual oleh pengusaha maupun pemerintah daerah.

Dalam menghitung potensi penerimaan cukai kantong plastik, peneliti mendapati keterbatasan mengenai data konsumsi kantong plastik di Indonesia secara statistik, sehingga peneliti menggunakan data rata-rata konsumsi kantong plastik di Indonesia tahun 2016 dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menunjukkan bahwa konsumsi kantong plastik di Indonesia mencapai angka 106.065.217 kilogram per tahun.

Dengan menggunakan asumsi tarif cukai sesuai usulan Menteri Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 200 per lembar atau Rp 30.000 per kilogram kantong plastik serta didukung rata-rata konsumsi kantong plastik di Indonesia

sebesar 106.065.217 kilogram per tahun, maka potensi penerimaan cukai dari kantong plastik akan diperoleh sebesar Rp 3.181.956.510. Potensi penerimaan cukai dari kantong plastik sebesar Rp 3,18 triliun ini diperkirakan akan menyumbang angka yang lebih besar dibandingkan penerimaan cukai dari etil alkohol (EA) tahun 2019 yang hanya Rp 120 miliar rupiah. Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan pengajuan tarif terhadap cukai kantong plastik diharapkan mampu menekan konsumsi plastik hingga 50 persen. Tarif yang diusulkan juga masih rendah dibanding beberapa negara yang sudah menerapkan cukai plastik. Usulan tarif yang masih rendah ini dilakukan untuk menghindari dampak signifikan (*shock*) pada pelaku usaha dan masyarakat. Perkiraan penerimaan cukai dari kantong plastik dengan tarif spesifik ini membawa kesimpulan bahwa ekstensifikasi barang kena cukai pada kantong plastik memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan cukai secara keseluruhan dan secara khusus juga mampu meningkatkan penerimaan aneka cukai.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian diatas, dapat diambil simpulan berikut:

- 1) Gagasan ekstensifikasi barang kena cukai pada kantong plastik layak untuk dipertimbangkan melihat penggunaan kantong plastik yang telah memenuhi sifat dan karakteristik barang kena cukai dalam Pasal 2 ayat (1) UU Cukai yakni perlu dikendalikan akibat ketergantungan tinggi yang cenderung berlebihan terhadap kantong plastik, perlu dilakukan pengawasan terkait bahaya penggunaan kantong plastik yang tidak memenuhi standar, penggunaan kantong plastik yang berdampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup, serta pemakaiannya perlu dibebankan pungutan negara demi mewujudkan keadilan dan keseimbangan.
- 2) Pemerintah dalam hal mewujudkan gagasan ekstensifikasi cukai kantong

plastik dapat membuat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait ekstensifikasi cukai kantong plastik, melakukan berbagai kajian terhadap barang yang akan dikenakan cukai melalui *benchmarking* terhadap penerapan pemungutan cukai plastik di negara lain, serta melakukan sosialisasi baik secara internal maupun eksternal kepada pihak yang terkait.

- 3) Potensi penerimaan dari pungutan cukai kantong plastik dengan menggunakan asumsi tarif cukai usulan Menkeu yakni sebesar Rp 200 per lembar atau sekitar Rp 30.000 per kilogram kantong plastik, didukung angka rata-rata konsumsi kantong plastik di Indonesia sebesar 106.065.217 kilogram per tahun, maka akan diperoleh angka Rp 3.18 triliun. Potensi penerimaan cukai kantong plastik selain meningkatkan penerimaan cukai keseluruhan, secara khusus juga meningkatkan penerimaan aneka cukai.

### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, saran yang dapat menjadi bahan masukan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah dalam menetapkan kebijakan cukai atas kantong plastik harus melihat *cost* dan *benefit* dari kebijakan. Pemerintah harus dapat menjamin keberlangsungan kegiatan industri baik hulu maupun hilir terkait kantong plastik. Untuk menghindari *shock* pada pelaku usaha dan masyarakat, pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi sebagai upaya promotif sekaligus preventif tentang bahaya penggunaan kantong plastik terhadap kesehatan dan lingkungan.
- 2) Penelitian ini memiliki keterbatasan pada data konsumsi kantong plastik, sehingga pada penelitian selanjutnya dapat diperdalam terkait data konsumsi kantong plastik untuk melihat lebih detail terkait proyeksi penerimaan cukai kantong plastik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chandra, Maria & Rini Gufraeni. (2009). *Kajian Ekstensifikasi Barang Kena Cukai pada Minuman Ringan Berkarbonasi* (Vol. 16, No. 3). Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi.
- Cnossen, Sijbren. (1977). *Excise Systems: Global Study of The Selective Taxation Goods and Services*. London: The Johns Hopkins University Press.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2020). *Bicara Cukai The Series: Cakap Cukai #1: Teori Dan Filosofi Cukai*. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kementerian Keuangan RI.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (2019). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2019*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kemenkeu RI.
- Ekawati, Sulistya. (2016). *Mengkritisi Kebijakan Penanganan Kantong Plastik di Indonesia* (Vol. 10, No. 6). Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, KLHK.
- Haoran He. (2012). *Effects of environmental policy on consumption: lessons from the Chinese plastic bag regulation*. Environment and Development Economics.
- Hutasoit, Eva M. dan Haula Rosdiana. (2014). *Analisis Pengenaan Cukai atas Kendaraan Bermotor*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Hyman, David N. (1986). *Modern Microeconomics Analysis and Applications*. London: Times Mirror Mosby College Publishing.
- Jambeck, et. al. (2015). *Plastic Waste Inputs from Land into The Ocean*. Science vol. 347 Issue 6223. Retrieved from [www.sciencemag.org](http://www.sciencemag.org).
- Karim, Ibrahim A. *Ekstensifikasi Barang Kena Cukai dan Permasalahannya*. Dalam Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai Tahun 1995 hingga Tahun 2000, Kumpulan Catatan dan Tulisan. Jakarta: Departemen Keuangan.
- Karuniastuti, Nurhenu. (2019). *Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan dan Lingkungan* (Vol.03, No.1). Forum Teknologi.
- Kementerian Keuangan. (2019). *Ini Alasan Cukai Plastik Berbentuk Kantong Perlu Dikenakan*. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-alasan-cukai-plastik-berbentuk-kantong-perlu-dikenakan/>.
- Kementerian Keuangan. (2019). *Media Keuangan Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal* (Vol.14, No.144). Jakarta: Kemenkeu RI.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2019). *Laporan Kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2019*. Jakarta: Kemenperin.
- Kompas. (2018). *Jangan Mengemas Makanan Pakai Kresek, Bisa Beracun bagi Tubuh*. Retrieved from <https://lifestyle.kompas.com/read/2018/03/27/071000923/jangan-mengemas-makanan-pakai-kresek-bisa-beracun-bagi-tubuh>.
- Kompas. (2020). *Usulan Pungutan Cukai Sri Mulyani Kopi Susu Saset Hingga Asap Knapot*. *Kompas*. Retrieved from <https://money.kompas.com/read/2020/02/29/100000626/usulan-pungutan-cukai-sri-mulyani-kopi-susu-saset-hingga-asap-knapot>
- Liputan 6. (2019). *Tak Hanya Indonesia, 12 Negara Ini Juga Terapkan Cukai Plastik*. Retrieved from <https://m.liputan6.com/bisnis/read/4010998/tak-hanya-indonesia-12-negara-ini-juga-terapkan-cukai-plastik>.
- Mogomotsi, G. E. J. & Madigele, P. K. (2019). *Polluter pays or polluter enriching the retailers: the case of plastic bag levy failure in Botswana*. Ethiopian Journal of Environmental Studies and Management (Vol. 10 No. 4, Hal 472-481).
- Parthasarathi, Shome. (1995). *Tax Policy Handbook*. Fiscal Affairs Department International Monetary Fund.

- Purwoko. (2012). *Analisis Efektivitas Pengenaan Cukai atas Produk Kantong Plastik dan Dampaknya terhadap Perekonomian* (Vol. 16, No. 2). Kajian Ekonomi dan Keuangan, BKF Kemenkeu RI.
- Subiyantoro, Heru, ed. (2004). *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Tim Publikasi Katadata. (2019). *Ragam Kisah Sukses Sistem Pengolahan Sampah di Berbagai Negara*. Retrieved from <https://www.katadata.co.id/amp/timpublikasikatadata/berita/5e9a4c4b5ea1f/ragam-kisah-sukses-sistem-pengolahan-sampah-di-berbagai-negara>.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: HK 00.05.55.6497 Tentang Bahan Kemasan Pangan.
- Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. (2012). *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutikno dan Maryunani. (2006). *Ekonomi Sumberdaya Alam*. Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- World Economic Forum & Ellen Mac Arthur Foundation. (2016). *The New Plastics Economy: Rethinking the Future of Plastics*. Retrieved from [www.ellenmacarthurfoundation.org](http://www.ellenmacarthurfoundation.org).
- Yustiani, Syanni & Maryadi. (2019). *Studi Komparasi Penerapan Kebijakan Penggunaan Kantong Plastik* (Vol. 3, No. 2, Hal. 51-59). Jurnal Pajak Indonesia.